

MEMBACA HUTAN, MEMBACA MASA DEPAN: CATATAN ATAS TFFD DAN HUTAN INDONESIA

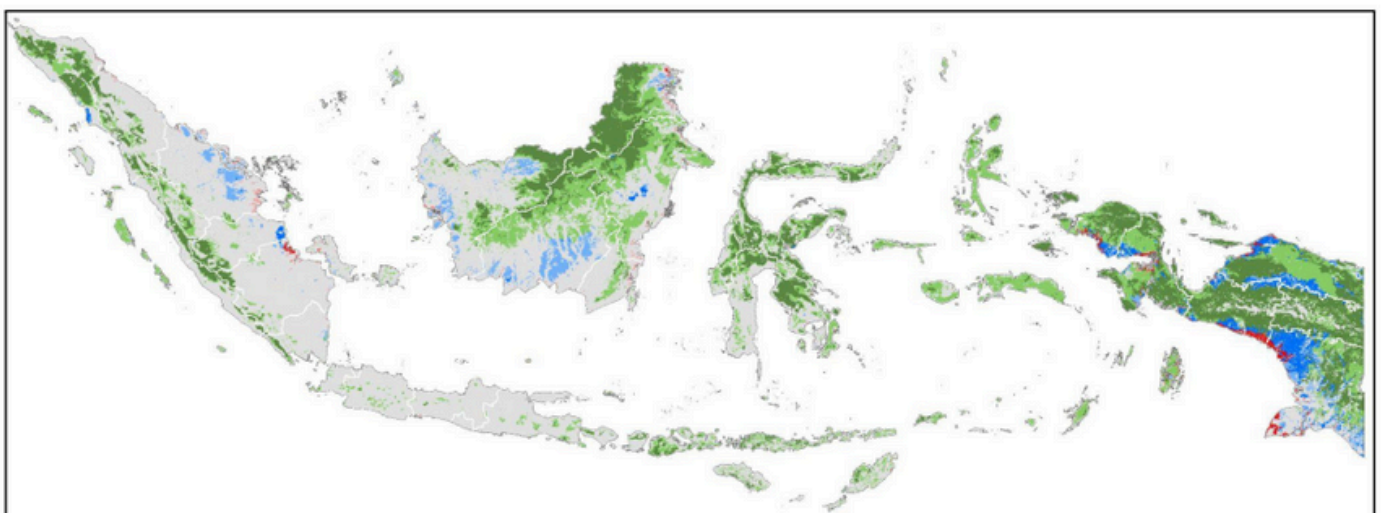


Pendanaan iklim menjadi sebuah wacana yang hampir selalu mewarnai meja perundingan UNFCCC. Implikasinya jelas, upaya adaptasi maupun mitigasi membutuhkan sumber daya pendanaan yang tidak sedikit. Bahkan menurut perhitungan UNEP (United Nations Environment Programme), kebutuhan pembiayaan untuk adaptasi di negara berkembang diperkirakan mencapai USD 215 miliar hingga USD 387 miliar per tahun hingga 2030. Angka ini menunjukkan bahwa beban biaya untuk adaptasi telah melampaui kemampuan pendanaan internasional yang tersedia, di mana kesenjangan pembiayaannya kini mencapai 10 hingga 18 kali lipat lebih besar dibandingkan aliran dana publik yang ada saat ini

Dalam konteks FOLU (forest and other land use), Brazil sebagai negara yang memiliki hutan hujan tropis terbesar menginisiasi Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Sebuah skema pendanaan internasional yang dirancang untuk memberikan insentif jangka panjang kepada negara-negara hutan tropis yang mampu mempertahankan tutupan hutan alamnya.

Cara kerjanya cukup sederhana, negara tropis yang menjaga tutupan hutan alamnya diberikan sebuah insentif finansial. Landasan insentif ini bukan hanya soal karbon, tapi juga menghitung keberadaan hutan sebagai bagian dari ekosistem yang harus dilindungi. Indonesia menyambut baik inisiatif ini. Pada kunjungan kenegaraan Presiden Brazil, Lula da Silva pada 23 Oktober 2025, inisiatif ini menjadi salah satu topik pembicaraan. Presiden Prabowo kemudian memberikan dukungan atas inisiatif ini dan berkomitmen untuk memberikan pendanaan hingga USD 1 miliar. Suatu komitmen yang cukup mengejutkan banyak pihak. Karena Indonesia tidak seharusnya turut memberikan 'urunan' terhadap inisiatif ini, karena seharusnya Indonesia yang perlu mendapatkan insentif finansial.

Tapi terlepas dari keterkejutan itu, skema ini datang pada saat yang krusial bagi Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki sekitar 90 juta hektare hutan alam. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari pilihan-pilihan kebijakan yang akan menentukan arah pengelolaan sumber daya alam ke depan. TFFF bisa menjadi pilihan pembiayaan konservasi yang menjanjikan bagi Indonesia, asal dirancang dengan benar-benar menempatkan perlindungan hutan sebagai tujuan utama, bukan sekadar instrumen finansial.





Hutan sebagai Aset, Bukan Sekadar Ruang Produksi

Tidak semua hutan masuk dalam perhitungan TFFF. Skema ini hanya menghitung hutan alam, yaitu hutan yang tumbuh alami, termasuk hutan alam yang pulih kembali lewat restorasi. Skema ini mengecualikan perkebunan pohon dan penanaman baru yang bukan hutan alam. TFFF juga membatasi area yang bisa dihitung pada kelompok hutan tropis tertentu, lalu memakai ambang tutupan kanopi sekitar 20 sampai 30 persen sebagai pintu masuk kelayakan.

Akibatnya, mangrove hanya masuk jika ia masuk kategori “mangrove yang bersebelahan” dengan area hutan yang diakui TFFF. Hutan gambut juga tidak otomatis aman, karena TFFF mengandalkan ukuran kanopi, sementara concept note TFFF versi 3.0 mengakui beberapa ekoregion seperti gambut bisa memiliki kanopi alami lebih rendah. Ini membuat sebagian area berisiko tidak terbaca dalam perhitungan, walau nilainya sangat besar.

Posisi mangrove dan gambut yang patut dicermati ini berkaitan langsung dengan bagaimana Indonesia bisa mendapatkan manfaat maksimal dari TFFF. Dalam analisis spasial MADANI, hutan alam di fungsi ekosistem gambut mencapai sekitar 9,7 juta hektare. Hutan alam mangrove pada 2024 mencapai sekitar 3,37 juta hektare jika kita gabungkan mangrove primer dan sekunder. Artinya, ada sekitar 13,1 juta hektare hutan alam yang seharusnya perlu untuk tercakup dalam desain skema ini.

Situasi ini juga mengingatkan kita pada masalah lama. Kebijakan kehutanan terlalu lama memandang hutan sebagai ruang produksi kayu dan lahan investasi. TFFF memberi peluang untuk menggeser cara pandang itu. Berbeda dengan banyak skema pembiayaan iklim berbasis offset, TFFF memberikan insentif atas keberhasilan menjaga hutan itu sendiri, tanpa harus menjual karbon atau menghitung penghindaran emisi. Pendekatan ini berpotensi menghindari dilema etis pasar karbon, di mana konservasi sering dikompromikan oleh kepentingan offset. Kita bisa mulai menilai hutan karena fungsi ekologisnya, keanekaragaman hayatinya, dan perannya dalam menjaga stabilitas iklim.

Analisis yang MADANI lakukan, diharapkan dapat berkontribusi sebagai pembacaan awal. Karena dilakukan dengan menggunakan klasifikasi bioma untuk memilah hutan alam yang relevan dengan desain TFFF dari tutupan lahan lain yang selama ini sering ikut “lolos” sebagai hutan dalam praktik kebijakan.

Gambut dan Mangrove sebagai Salah satu Aset Iklim yang Menentukan

Ekosistem gambut dan mangrove menempati posisi yang strategis dalam agenda iklim nasional. Dengan sekitar 9,7 juta hektare hutan alam Indonesia berada di fungsi ekosistem gambut, dan hutan alam mangrove pada 2024 sekitar 3,36 juta hektare (jika kita gabungkan mangrove primer dan sekunder), posisinya menjadi sangat strategis. Luasan ini tidak jauh berbeda dengan luasan yang dirujuk pada level global. Data dari wetland menempatkan Indonesia sebagai pemilik ekosistem mangrove terbesar di dunia, dengan luasan sekitar 3,4 juta hektare atau sekitar 23% dari total global.

Angka-angka ini penting karena gambut dan mangrove memberi dampak yang langsung kita rasakan. Mereka menyimpan karbon dalam jumlah besar. Mereka juga menjaga pesisir dan daerah rawan banjir. Mereka membantu ketahanan pangan dan mata pencaharian di banyak tempat. Karena itu, saat kita bicara insentif untuk “menjaga hutan tetap berdiri”, kita perlu memastikan desainnya benar-benar menangkap dua ekosistem ini, bukan hanya hutan yang mudah terbaca oleh ukuran-ukuran umum.

Di sisi kebijakan, fokus pada gambut dan mangrove juga sejalan dengan arah besar FOLU Net Sink 2030, yaitu kondisi saat serapan sektor kehutanan dan lahan melampaui emisinya pada 2030. Ini juga menguatkan satu pesan kunci untuk publik. Perlindungan hutan alam bukan sekadar isu konservasi. Ia bagian dari strategi pembangunan rendah emisi yang perlu kita jaga lewat tata kelola, data yang terbuka, dan insentif yang tepat sasaran. Namun, manfaat TFFF bagi Indonesia akan sangat ditentukan oleh tata kelola yang adil, termasuk keterlibatan negara-negara tropis dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan serta mekanisme distribusi manfaat yang benar-benar sampai ke tingkat tapak.



Sumber foto: MADANI

Memilih untuk Menjaga

Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah berapa besar dana yang bisa diperoleh Indonesia dari TFFF. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia bersedia menjadikan hutan alam sebagai fondasi pembangunan jangka panjang, bukan sekadar cadangan ruang bagi ekspansi berikutnya. Dalam konteks itu, gambut dan mangrove layak ditempatkan di pusat pembacaan, karena keduanya bukan hanya penutup lahan, melainkan penyangga iklim dan ketahanan wilayah. Jika skema insentif seperti TFFF ingin benar-benar relevan bagi Indonesia, ia harus mampu melihat gambut dan mangrove secara adil dalam cara menghitung, memetakan, dan menyalurkan manfaatnya.

Pembacaan awal ini menjadi dasar bagi kajian MADANI selanjutnya untuk menelaah lebih jauh implikasi kebijakan, tata kelola, dan keadilan distribusi dari skema pendanaan seperti TFFF. Menjaga sekitar 90 juta hektare hutan alam bukan soal kemampuan teknis atau akses pendanaan global. Ia adalah soal pilihan politik, tentang bagaimana negara memaknai hutan, dan untuk siapa hutan itu dipertahankan. Dan pilihan itu akan terlihat paling jelas dari cara kita menjaga gambut dan mangrove, karena kerusakan di dua ekosistem ini cepat berubah menjadi biaya sosial, ekonomi, dan risiko iklim yang ditanggung publik.





Yayasan Madani Berkelanjutan (Manusia dan Alam untuk Indonesia Berkelanjutan) adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.